



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Provinsi
Kalimantan Timur**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Kasih sayang dan IjinNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi, diberi amanah oleh pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung kemajuan pembangunan Kalimantan Timur, maka bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tersebut berupa laporan kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014.

Pelaporan kinerja ini bertujuan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik yang menyangkut substansi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak, guna perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami untuk masa-masa yang akan datang.

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196602041988031016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran, dengan kategori capaian **sangat baik**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
G. Sarana dan Prasarana Kerja	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Indikator Kinerja Utama.....	20
C. Perjanjian Kinerja	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya ..	24
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	27
C. Analaisi Capaian Kinerja	28
D. Realisasi Anggaran	66
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim	70
B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang	70
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023	22

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan.....	5
Table 1.2	Rekap PNS berdasarkan Pendidikan dan Gender	6
Table 1.3	Sarana dan Prasana Kerja	9
Table 2.1	Perencanaan Strategis	15
Table 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	21
Table 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
Table 2.5	Target Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2023.....	23
Table 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	23
Table 3.1	Hasil Evaluasi Tahun 2022	24
Table 3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022	24
Table 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	28
Table 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi kerja Tahun 2023.....	31
Table 3.5	Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023	32
Table 3.6	Komponen Perhitungan Indeks Kalimantan Timur	33
Table 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra.....	35
Table 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/Standar Nasional Tahun 2023	35
Table 3.9	Daftar Rincian Hibah Pemerintah Pusat Provinsi Kaltim Tahun 2023	36
Table 3.10	Daftar Rincian Hibah Badan, Lembaga dan Ormas Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2023.....	37
Table 3.11	Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2023	38
Table 3.12	Rincian Bantuan Keuangan Penyelenggara Pemilu Provinsi Kaltim Tahun 2023	39
Table 3.13	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	41
Table 3.14	Realisasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Tahun 2023	41
Table 3.15	Daftar Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA Tahun 2023.....	42

Table 3.16 Realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tahun 2023	45
Table 3.17 Realisasi Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023	48
Table 3.18 Data Pembinaan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023	49
Table 3.19 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2023	59
Table 3.20 Daftar Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Tahun 2023	59
Table 3.21 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023	63
Table 3.22 Daftar Data Konflik, Potensi Konflik dan Penyelesaian Masalah Tahun 2023	64
Table 3.23 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	66
Table 3.24 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peranan yang penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya upaya untuk mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar pembentukan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Badan Kesbangpol Prov Kaltim, Dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan melalui Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada dokumen perencanaan serta berdasarkan pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kesbangpol atas kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LKjIP akan memberikan kondisi obyektif pada tahun 2023, perencanaan strategis, target

dan pencapaian kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik

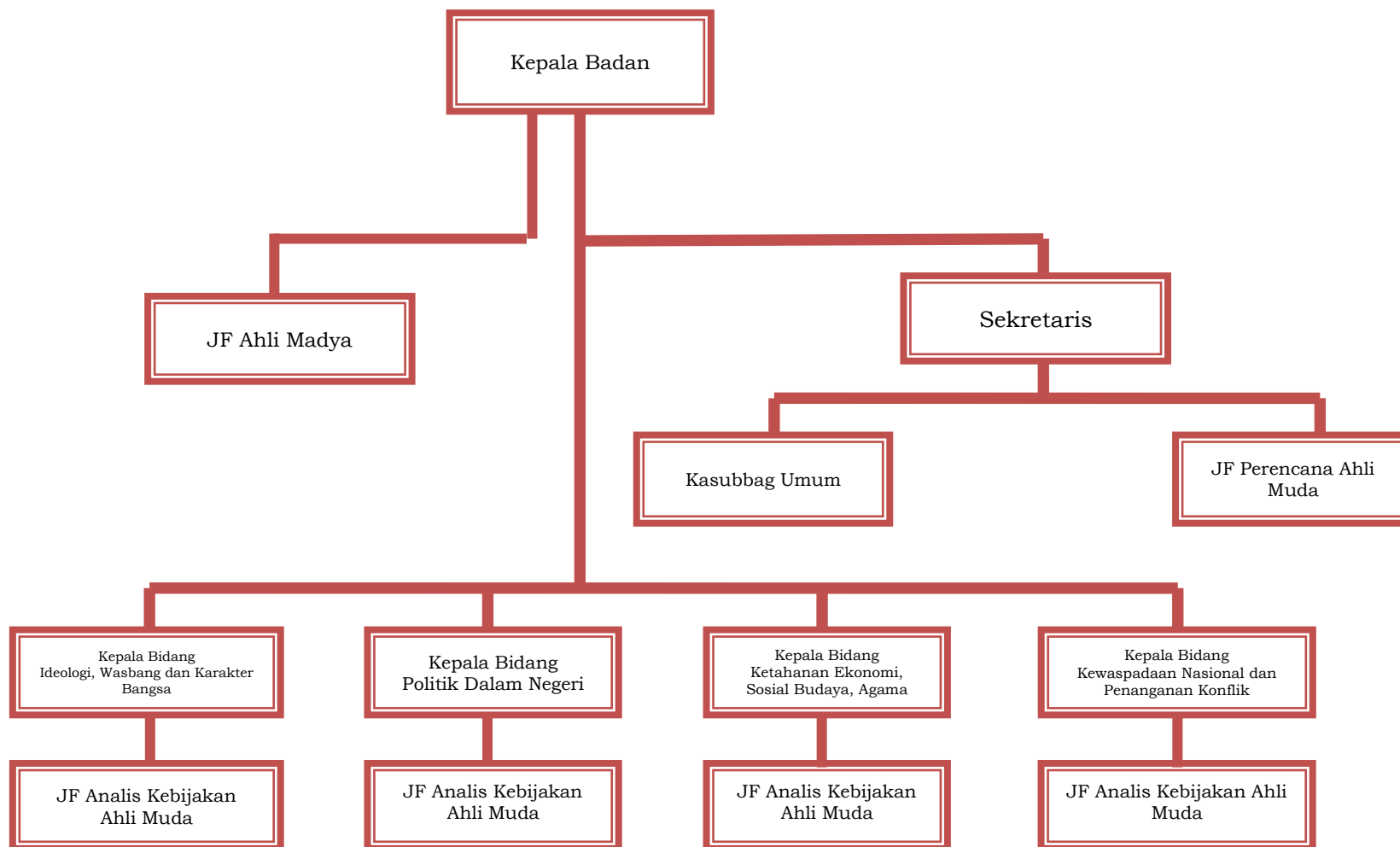
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur;

C. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang. Kemudian Pada tanggal 31 Mei 2022, Gubernur Kalimantan Timur melantik beberapa pejabat di Ruang lingkup Badan Kesbangpol sehingga secara rinci merubah STOK Badan Kesbangpol Prov Kalimantan Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 mempunyai personil sebanyak 55 orang terdiri dari 7 pejabat struktural, 9 fungsional, 24 orang pejabat pelaksana, dan 15 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 antara lain : 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 5 Jabatan Administrator, serta 1 Jabatan Pengawas.

Adapun rekapitulasi pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Table 1.1 Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim
Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan				
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JPT Pratama	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Administrator	3	2	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Pengawas	1	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	0
Fungsional	4	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksana	16	7	0	10	13	0	0	6	3	16	0	0
Tenaga Kontrak	7	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
PNS	28	12	7	20	13	0	8	11	3	18	0	0
PNS + Tenaga Kontrak	7	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
Jumlah	50		7	20	13	0	8	15	3	24	0	0

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah dalam pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Table 1.2 Rekap PNS Kesbangpol Prov. Kaltim berdasarkan Pendidikan dan Gender

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
S.3	0	0	0
S.2	7	2	9
S.1	5	7	12
D.IV	0	0	0
D.III	2	1	3
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	14	2	16
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
Jumlah	28	12	40

E. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*), mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu merumuskan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi pemerintah. Acuan indikator kinerja tingkat nasional yang dapat digunakan adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dikeluarkan oleh kementerian/Lembaga, atau Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai PD yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan menjaga stabilitas daerah agar terbebas dari ancaman dan gangguan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta meningkatkan etika berpolitik, berbudaya, berdemokrasi, dan jiwa nasionalisme. Aspek Strategis Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik.
2. Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah.
3. Meningkatkan stabilitas sosial ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan serta terbangunnya suatu kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat yang kokoh.
4. Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan:
 - a. Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air
 - b. Menyebarnya ideologi/paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
 - c. Meningkatnya radikalisme
 - d. Intoleransi antar agama
 - e. Sparatisme dan terorisme
 - f. Konflik SARA
 - g. Tergerusnya karakter/jati diri bangsa dan kearifan lokal
 - h. Masuknya bangsa asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
 - i. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi/keterbukaan mengakses informasi yang tidak diimbangi kemampuan menangkal atau mengcounter informasi negatif.

2. Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dan rendahnya pemahaman terhadap arti penting orientasi serta visi bersama mengenai integritas bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial.
4. Bermunculnya paham-paham radikal, sapatisme dan terorisme untuk mengganggu persatuan dan kesatuan.
5. Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis dikalangan masyarakat dengan melecehkan simbol-simbol negara, serta kecenderungan mengedepankan kepentingan golongan dan kelompok.
6. Tingginya kuantitas keberadaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belum dapat diimbangi dengan kualitas keberdayaan ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan.
7. Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum. Menjalin kemitraan/kerjasama ormas sebagai mitra pemerintah di bidang bina ideologi, sosial dan budaya, kewaspadaan nasional dalam negeri.
8. Menjaga keberlangsungan konsolidasi kebangsaan dalam menetapkan stabilitas politik dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan nasional.
9. Menata lingkup ormas sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan menciptakan ormas yang mandiri dan akuntabel.
10. Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
11. Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama sehingga terjadi konflik belatar agama, terkait dengan kerukunan, pendirian rumah ibadah dan merebaknya aliran keagamaan/kepercayaan sinergitas antar pemerintah

(kementerian/Lembaga terkait) dengan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh agama dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlunya sosialisasi terkait dengan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006.

12. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi kader anggota partai politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal.
13. Belum optimalnya penguatan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan bidang politik.
14. Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan pemilu.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun jumlah sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2023

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	ALAT BESAR	4	
	- Concrete Mixer	1	Unit
	- Air Compresor	1	Unit
	- Transportable Generating Set	1	Unit
	- Pompa Air	1	Unit
2	KOMPUTER	242	
	- P.C Unit	61	Unit
	- Lap Top	37	Unit

	- Note Book	19	Unit
	- Tablet PC	6	Unit
	- Personal Komputer lainnya	3	Unit
	- CPU (Peralatan Mainframe)	2	Unit
	- Hard Disk	3	Unit
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
	- Computer Compatible	21	Unit
	- Monitor	6	Unit
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	69	Unit
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
	- Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
	- External/ Portable Hardisk	3	Unit
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	6	Unit
	- Server	2	Unit
	- Router	2	Unit
3	ALAT KESELAMATAN KERJA	3	
	- Tenda	3	Set
4	ALAT ANGKUTAN	53	
	- Station Wagon	4	Unit
	- Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Unit
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	17	Unit
	- Pick Up	1	Unit
	- Sepeda Motor	13	Unit
	- Scooter	2	Unit
	- Speed Boat / Motor Tempel	2	Unit
	- Motor Boat	7	Unit
	- Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	6	Unit
5	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	
	- Cermin Besar	3	Unit
6	ALAT PERTANIAN	5	
	- Rak-Rak Penyimpan	1	Unit
	- Lemari Penyimpan	4	Unit
7	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1717	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	9	Unit
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	6	Unit
	- Mesin Ketik Listrik	5	Unit
	- Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	- Lemari Besi/Metal	20	Unit
	- Lemari Kayu	89	Unit
	- Rak Kayu	5	Unit
	- Filing Cabinet Besi	35	Unit
	- Brandkas	5	Unit
	- Kardex Besi	1	Unit
	- Lemari Kaca	7	Unit
	- Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
	- White Board	18	Unit
	- Peta	10	Unit
	- Alat Penghancur Kertas	5	Unit

- Mesin Absensi	1	Unit
- Overhead Projector	5	Unit
- White Board Electronic	1	Unit
- Alat Sidik Jari	1	Unit
- Papan Nama Instansi	4	Unit
- Papan Pengumuman	2	Unit
- Alat Kantor Lainnya	15	Unit
- Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
- Meja Kerja Kayu	2	Unit
- Meja Rapat	39	Unit
- Tempat Tidur Kayu	1	Unit
- Meja Ketik	1	Unit
- Meja Telepon	8	Unit
- Meja Podium	1	Unit
- Meja Resepsionis	3	Unit
- Meja Tambahan	14	Unit
- Meja Panjang	1	Unit
- Meja 1/2 Biro	1	Unit
- Meja Makan Besi	8	Unit
- Kursi Rapat	231	Unit
- Kursi Tamu	3	Unit
- Kursi Putar	7	Unit
- Kursi Biasa	1	Unit
- Kursi Lipat	3	Unit
- Meja Komputer	7	Unit
- Sofa	3	Unit
- Meubeler lainnya	1	Unit
- Jam Mekanis	9	Unit
- Alat Pembersih lainnya	1	Unit
- Lemari Es	4	Unit
- A.C. Window	2	Unit
- A.C. Split	47	Unit
- Kipas Angin	10	Unit
- Rice Cooker (Alat Dapur)	368	Unit
- Rice Warmer	121	Unit
- Tabung Gas	2	Unit
- Alat Dapur lainnya	17	Unit
- Televisi	28	Unit
- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	Unit
- Loudspeaker	7	Unit
- Sound System	16	Unit
- Compact Disc	1	Unit
- Wireless	1	Unit
- Mic Conference	32	Unit
- Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Unit
- Stabilisator	2	Unit
- Camera Video	3	Unit
- Camera film	7	Unit
- Lambang Garuda Pancasila	4	Unit

	- Gambar Presiden/Wakil Presiden	9	Unit
	- Tiang Bendera	2	Unit
	- Tangga Aluminium	1	Unit
	- Dispenser	32	Unit
	- Mimbar/Podium	1	Unit
	- Coffee Maker	8	Unit
	- Handy Cam	6	Unit
	- Karpet	1	Unit
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	47	Unit
	- Alat Pemadam/Portable	1	Unit
	- Pakaian Panas/Lengkap	3	Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	Unit
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	57	Unit
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	Unit
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	Unit
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
	- Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	22	Unit
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	116	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Unit
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Unit
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4	Unit
	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	6	Unit
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	73	Unit
	- Buffet Kayu	1	Unit
8	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	123	
	- Compact Disc Player	3	Unit
	- Microphone/Wireless MIC	3	Unit
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	Unit
	- Digital Audio Taperecorder	1	Unit
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	4	Unit
	- Assignment Switcher	1	Unit
	- Camera Electronic	5	Unit
	- Camera Film	2	Unit
	- Lensa Kamera	2	Unit
	- Layar Film/Projector	2	Unit
	- Motor Driver	1	Unit
	- Camera Digital	4	Unit
	- Camera Conference	3	Unit
	- Alat Studio Video Lainnya	1	Unit
	- Mesin Jilid Bundar	1	Unit
	- Telephone (PABX)	7	Unit

	- Pesawat Telephone	16	Unit
	- Handy Talky (HT)	42	Unit
	- Facsimile	3	Unit
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Unit
	- Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Unit
	- Unit Tranceiver UHF Portable	1	Unit
	- Antene MF/MW Portable	2	Unit
9	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	15	
	- alat kedokteran poliklinik lainnya (dst)	15	Tas
10	ALAT LABORATORIUM	27	
	- alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	2	Unit
	- Refletance	1	Unit
	- Step Up/Down (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2	Unit
	- Stabilizer	3	Unit
	- alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	Unit
	- alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2	Unit
	- Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	Unit
	- Screen Pembaras	1	Unit
	- laboratory safety equipment lainnya (dst)	1	Unit
	- alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	3	Unit
	- alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1	Unit
	- Pot Besar	8	Unit
	- Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Unit
11	ALAT PERSENJATAAN	1	
	- Alat Khusus SAR (Search And Resque)	1	Set
12	BAHAN PERPUSTAKAAN	42	
	- Buku Umum Lai-lain	38	Buku
	- Hukum	4	Buku
13	SOFTWARE	3	
	- Software	6	Software

Sumber Data : Inventaris Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan gambaran dan arahan kebijakan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan perencanaan strategis sebagai panduan kerja operasional yang visioner sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visinya adalah: **“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”** Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke 1 dan 5 yaitu **“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas”** dan **“Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik”**. Sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

Tabel 2.1
Perencanaan Strategis Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	72,86	73.50	74.50	75.50	82	82,05

Program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara. Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

						Pemantauan Situasi Politik a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
--	--	--	--	--	--	--

					3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah b. Penyusunan Bahan
--	--	--	--	--	--	---

						Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

						Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
--	--	--	--	--	--	---

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang muncul dalam RPJMD 2019-2023, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Perhitungan dilakukan dengan melalui 4 tahapan dengan berdasarkan 22 indikator dan 3 Aspek yang menjadi dasar Penilaian: 1. Perhitungan Indeks indikator data kuantitatif 2. Mempertimbangkan data Kualitatif 3. Perhitungan Indeks Vareabel 4. Perhitungan IDI	Pengumpulan dengan 4 metode: 1. Koding Dokumen/Koran 2. Wawancara mendalam 3. FGD 4. Rilis Cara perhitungan no 1 dan 2 menggunakan data kuantitatif sumber data utama sedangkan Untuk no 3 dan 4 menggunakan data kuantitatif untuk mengkonfirmasi, meluruskan dan melengkapi	Kesbangpol

Sumber Data: IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan amanah dan kesepakatan dari atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur akan mampu mewujudkan kesinambungan kinerja dan menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya. Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 seperti dalam tabel 2.4:

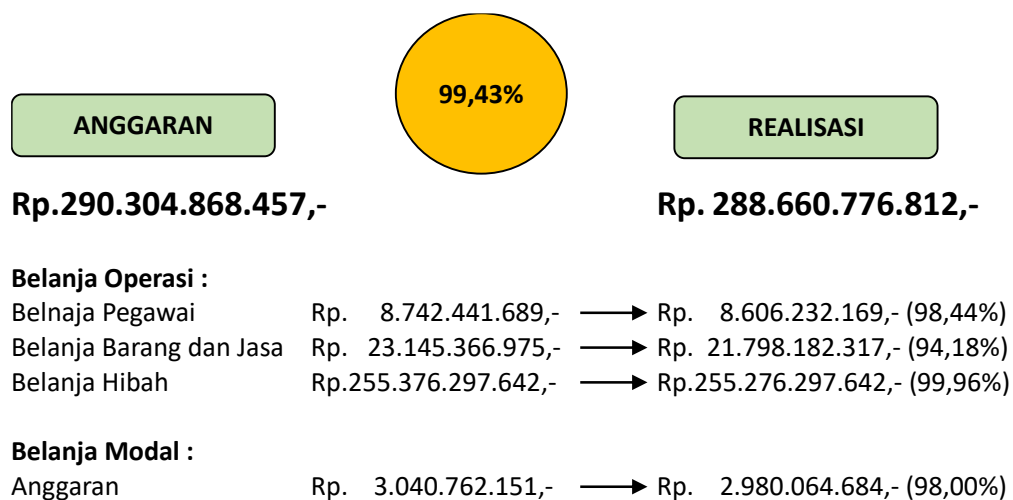
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82,05

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.111.878.505.813,- dan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 menjadi Rp.290.304.868.457,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.288.660.776.812,- atau sebesar 99,43%, seperti gambar terlihat dibawah ini:

Gambar : 2.1 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023



2. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.5
Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	Rp. 8.742.441.689,-	Rp. 8.606.232.169,-	98,44%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 23.145.366.975,-	Rp. 21.798.182.317,-	94,18%
	Belanja Hibah	Rp. 255.376.297.642,-	Rp. 255.276.297.642,-	99,96%
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.040.762.151,-	Rp. 2.980.064.684,-	98,00%
	Jumlah	Rp. 290.304.868.457,-	Rp. 288.660.776.812,-	99,43%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja operasi per Sasaran Strategis
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Rp. 290.304.868.457,-	Rp. 288.660.776.812,-	99,43%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 700.1.2.1/2667/ITPROV-II tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil Evaluasi sebesar **64,60** atau predikat **“B” (Baik)**, sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini:

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Tahun 2022

Hasil Evaluasi Tahun 2022						
No	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2021	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Kinerja	30	21,79	Perencanaan Kinerja	30	20,70
2	Pengukuran Kinerja	25	19,38	Pengukuran Kinerja	20	14,40
3	Pelaporan Kinerja	15	9,39	Pelaporan Kinerja	10	7,70
4	Evaluasi Kinerja	10	4,91	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	11,80
5	Capaian Kinerja	20	11,50	Capaian Kinerja	20	10,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,97	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B (Baik)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B (Baik)

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi Tahun 2022 yang dilaksanakan Tahun 2023 “tidak dapat diperbandingkan” dengan Tahun sebelumnya, karena berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Sesuai hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja: a. Menetapkan indikator/ukuran kinerja yang SMART/realistis pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja/PK) agar dapat tercapai indikator outcome yang diinginkan. b. Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala dan dilengkapi hasil laporan pemantauan/monev dengan menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan sasaran/kinerja yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2023, hal ini menjadi perhatian utama, kami sudah melakukan penyusunan renstra Tahun 2024-2026 sehingga kualitas dokumen Renstra akan lebih baik lagi, kemudian renstra dapat dimanfaatkan sebagai bahan dokumen RKA dan Renja yang lebih berkualitas.	Renstra telah dibuat sesuai Permendagri 86 tahun 2017. Renstra sebagai pedoman bagi organisasi untuk semua Aparatur Sipil Negara yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur untuk berkomitmen melaksanakan target yang ditetapkan.
2.	Pengukuran Kinerja: a. Dasar dalam pemberian reward dan punishment, penyesuaian strategi dan langkah-langkah dalam mencapai kinerja. b. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang harus dilakukan	Evaluasi internal terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Kepala, Sekretaris dan Para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Kesbang Politik dan selanjutnya hasil evaluasi capaian tersebut akan ditindaklanjuti terhadap beberapa capaian yang belum maksimal dan selanjutnya akan dikomunikasi kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan.	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Tindak Lanjutnya.

		Reward dan punishment sudah diberlakukan pada capaian kinerja dan kedisiplinan di Lingkungan Badan Kesbangpol Prov Kaltim.	
3.	<u>Pelaporan Kinerja:</u> a. Mendorong pemanfaatan menginformasikan dalam laporan kinerja (LKJIP) agar menjadi perhatian utama untuk: • penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja. • melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, yang selanjutnya digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.	Organisasi sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja baik output maupun outcome. Hal ini didasarkan atas Renstra yang telah dibuat dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja disertai didukung Program dan Kegiatan serta Anggaran dikuatkan SDM yang professional. Dalam melakukan evaluasi capaian kinerja yang bersifat analisis selalu didukung dengan data yang andal, sehingga dapat diketahui capaian sebelumnya dan capaian sesudahnya yang bersifat perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya. Informasi Kinerja yang sudah dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan informasi dari capaian kinerja yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang didukung program dan kegiatan, anggaran serta SDM.	Capaian Sasaran / Kinerja Output dan Outcome. Dokumen Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja. (terlampir) Data dukung mengenai informasi capaian kinerja. Dokumen Laporan Kinerja.
4.	<u>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:</u> a. Melaksanakan evaluasi kinerja atas capaian saran kinerja/program yang telah	Tahun 2023 kami sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan, hasil monitoring	Setiap triwulan membuat laporan triwulan dan evaluasi. hal ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja

	diperjanjikan (PK) secara berkala/periode untuk menilai capaian sasaran kinerja /program/kegiatan dan dilengkapi laporan evaluasi yang menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan kinerja agar dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja. b. Mengoptimalkan atas hasil evaluasi saki yang tertuang dalam rekomendasi SAKIP.	dituangkan dalam Laporan. Selanjutnya akan dimuat permasalahan dan rekomendasi.	organisasi dan meindaklanjuti kegiatan yang belum berjalan dengan demikian kinerja lebih optimal.
5.	Capaian Kinerja: Capaian kinerja harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan dilengkapi dengan informasi kinerja yang dapat diandalkan (mudah ditelusuri dengan data berkala).	Berkaitan hal ini, kami dalam rangka meningkatkan capaian kinerja baik output dan outcome, dengan melaksanakan evaluasi secara priodik dan melakukan monev per triwulan agar pencapaian sasaran, dan Kinerja organisasi tercapai optimal.	Melaksanakan monitoring evaluasi secara priodik, yakni bulanan, triwulan dan semester, dan dituangkan dalam Laporan monitoring evaluasi.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai Review Renstra yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 101,90% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82,05	Triwulan I	25	25	100%
					Triwulan II	25	25	100%
					Triwulan III	32,02	33,58	104,87%
					Triwulan IV	0	0	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023, yaitu terdapat satu sasaran, dengan satu indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap satu sasaran dan satu indikator telah dicapai sebesar 101,90% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 5 (lima) program. antara lain: Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Dari lima program tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yakni:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik,
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan

- Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82,05	83,58	101,86%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur persentase capaian kinerja sebesar 101.86%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

Badan Kesbangpol Prov. Kaltim pada periode ini telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2019-2023 dalam menghadapi tantangan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2023. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 terhadap IKU dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan / penurunan Tahun 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7/7*100%)
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	0	77,67	81,99	81,02	83,58	2,56%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi periode kelima IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 pada tahun 2023 dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2,56% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 tidak dapat diperbandingkan karena pada tahun 2020 ada review renstra sehingga target kinerja mengalami perubahan.

Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Kesenjangan dan Aspek Lembaga Demokrasi. Indeks Demokrasi Kalimantan Timur tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, Indeks Demokrasi Kalimantan Timur juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks

Demokrasi Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Angka Indeks Demokrasi Kalimantan Timur merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi. Rilis Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dilakukan setiap tahun, Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dirilis H+1 dari tahun berkenan, sehingga Indeks Demokrasi Kalimantan Timur yang disajikan pada laporan ini merupakan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam Indeks Demokrasi Kalimantan Timur adalah Kebebasan Sipil (7 indikator di dalamnya), Aspek Kesetaraan (7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (8 indikator). Hasil Indeks Demokrasi Kalimantan Timur disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.

Tabel 3.6
Komponen Perhitungan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur

No	Aspek	Indikator	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<i>Kebebasan Sipil</i>		91,40	<i>Baik</i>
1		Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	92,78	
2		Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	81,95	
3		Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	
4		Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	90,91	
5		Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	97,97	
6		Pemenuhan hak-hak pekerja	89,50	
7		Pers yang bebas dalam	83,78	

		menjalankan tugas dan fungsinya		
II	Kesetaraan		79,25	Sedang
8		Kesetaraan Gender	88,21	
9		Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00	
10		Anti monopoli sumber daya ekonomi	66,71	
11		Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	67,18	
12		Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94,29	
13		Akses masyarakat terhadap informasi publik	79,05	
14		Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,86	
III	Kapasitas Lembaga Demokrasi		81,06	Sedang
15		Kinerja Lembaga Legislatif	57,14	
16		Kinerja Lembaga Yudikatif	86,03	
17		Netralitas Penyelenggara Pemilu	77,27	
18		Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	68,18	
19		Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	74,46	
20		Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	
21		Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	80,00	
22		Pendidikan Politik pada kader partai politik	100,00	

Adapun sumber data yang digunakan dalam rangka pengukuran Indeks Demokrasi Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut:

- Dokumen Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dsb;
- Focus Group Discussion (FGD) Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder;
- Wawancara mendalam Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli;

- Surat Kabar Kab/Kota dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas; dan
 - Big Data Verifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan WM dengan portal berita online.
3. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82,05	83,58	101,87%

Pada tabel 3.7 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia, realisasi mencapai 83,58 dengan tingkat kemajuan 101,87%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

4. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan realisasi standar Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/Standar Nasional Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	83,58	73,66	88,13%

Pada tabel 3.8 dapat dilihat bahwa terdapat kemajuan yang sangat signifikan pada indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Kaltim, perbandingan realisasi capaian secara nasional dengan tingkat kelebihan 88,13 %.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja atau indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur

Adapun upaya/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung pengukuran dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur Tahun 2023 diantaranya:

1. Aspek Kebebasan Sipil, telah dilaksanakan kegiatan pada bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.

Pada Tahun 2023 Bantuan Keuangan dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu memberikan dana hibah uang kepada pemerintah pusat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 188.4/K.19/2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dengan rincian sbb :

Tabel 3.9
Daftar Rincian Penerima Hibah Pemerintah Pusat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Penerima Hibah	Besar Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepolisian Negara RI Provinsi Kalimantan Timur	47.700.000.000	
2	Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan	1.500.000.000	

	TNI AU Dhomber		
3	Komando Resor Militer 091/ASN	21.483.024.000	
4	Kodim 0901/Samarinda	200.000.000	
5	Rutan Kelas IIA Samarinda	50.000.000	
Jumlah		70.933.024.000	

Dan pada Tahun 2023 Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan dua Keputusan, yang pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.857/2023 dan yang kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 188.4/K.20/2023, masing-masing tentang Pemberian Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Daftar Rincian Penerima Hibah Badan, Lembaga dan Ormas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Penerima Hibah	Besar Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
1	DPC PEPABRI Kota Samarinda	100.000.000	
2	Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya	50.000.000	
3	Kerukunan Warga Kalimantan Timur Asal Buton Laporo Sinar Kalibunda	50.000.000	
4	Komunitas Insan Pejuang Kalimantan Timur	50.000.000	
5	Lembaga Peduli Masyarakat Bersatu	50.000.000	
6	Organisasi Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur (KIMKT)	50.000.000	
7	Kerukunan Dayak Kenyah Lebuq Timai Kalimantan Timur	200.000.000	
8	Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Kalimantan Timur	200.000.000	
9	Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI)	200.000.000	
10	Ikatan Keluarga Besar Sulawesi Tengah (IKABST)	200.000.000	
11	iCare Kalimantan Timur	200.000.000	
Total		1.350.000.000	

- Aspek Kesetaraan, telah dilaksanakan program/kegiatan pada bidang Ideologi Wasbang & Karakter Bangsa. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bangsa, dengan total jumlah

peserta keseluruhan sebanyak 12.931 orang, dan diterimanya penghargaan Anugerah Revolusi Mental Tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. GNRM merupakan forum yang difasilitasi dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 220/K.634/2022 tentang Perubahan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Timur.

3. Aspek lembaga demokrasi, telah dilaksanakan program/kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri, salah satu kegiatannya adalah memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebesar Rp.5000,- (lima ribu) per suara sah. Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBD yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2023 kepada Parpol sejumlah Rp8.123.695.000,-. Pencairan bantuan keuangan Parpol tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 469.2/K.39/2023 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tabel 3.11
Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Yang Mendapatkan Kursi di DPRD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Golkar	12	350.126	5.000	1.750.630.000
2	Partai PDIP	11	283.726	5.000	1.418.630.000
3	Partai Gerindra	8	223.738	5.000	1.118.690.000

4	Partai PKS	4	151.374	5.000	756.870.000
5	Partai Demokrat	3	122.576	5.000	612.880.000
6	Partai PAN	5	119.562	5.000	597.810.000
7	Partai PKB	5	114.241	5.000	571.205.000
8	Partai PPP	4	100.768	5.000	503.840.000
9	Partai Nasdem	2	95.159	5.000	475.795.000
10	Partai Hanura	1	63.469	5.000	317.345.000
Jumlah		55	1.624.739		8.123.695.000

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2023 juga memberikan bantuan keuangan dalam bentuk belanja hibah uang kepada penyelenggara pemilu, rincian anggaran adalah sbb:

Tabel 3.12
Rincian Bantuan Keuangan Penyelenggara Pemilu
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Penerima Hibah	Besar Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	121.366.113.842	
2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	53.603.464.800	
Jumlah		174.969.578.642	

Analisis penyebab kegagalan/kendala dalam pencapaian target:

Adapun kendala dalam Pencapaian Target dan Penyelesaiannya, diantaranya 3 indikator mengalami penurunan dan masih terdapat 1 Indikator yang nilainya masih dibawah 60, indikator yang nilai menurun yaitu :

1. Indikator Pemenuhan hak-hak pekerja (5,50).
2. Indikator Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah Lembaga Kinerja Legislatif (4,55).
3. Indikator Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat (0,60).

Sedangkan indikator yang nilainya masih di bawah 50 yaitu:

1. Indikator Kinerja Lembaga Legislatif (57,14).

Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Provinsi Kalimantan Timur diperoleh 8 perda yang disahkan dari 14 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2022.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan kegiatan yang akan dilakukan kedepan

Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, Badan Kesbangpol Kab/Kota, Pokja Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya upaya dalam Pencapaian dan Tindak Lanjut Indeks Demokrasi Kalimantan Timur ke depan, antara lain:

1. Pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikaitkan dengan atau difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan berpendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi. Digital literacy perlu ditekankan karena sebagian ekspresi, manipulasi pendapat, serta politik ketakutan (politics of fear) berlangsung lewat internet.
 2. Pemberian hibah bantuan keuangan partai politik dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik.
 3. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan best practice dialog politik dan pendidikan politik.
 4. Kaderisasi partai perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik.
 5. Audiensi dan sosialisasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap transparansi anggaran terhadap dalam penguatan demokrasi lokal.
 6. Pemanfaatan sistem informasi dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan situasi politik dalam negeri berbasis digital.
 7. Pasca penerapan IDI Metode Baru, peran stakeholder di daerah sebagai Pembina untuk menjadikan Pokja IDI sebagai prioritas dan memaksimalkan masing-masing peran yang telah ditentukan.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023,

dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	101,86	99,43	2.43%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Tabel 3.14
Realisasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	8% (12.187)	8,49% (12.931)	106,12%

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan menunjukkan capaian sebesar 106,12%, capaian kinerja dapat dikategorikan **sangat baik**. Program ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 72,56%, 98,49%, dan 99,97%.

Data Daftar Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Daftar Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi
Pelajar SLTA Tahun 2023

No	Nama	Tahun 2023				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Kalimantan Timur	10.752	-	-	2.205	12.931
2	Kota Samarinda	-	-	-	-	-
3	Kota Balikpapan	-	-	-	-	-
4	Kota Bontang	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Kutai Timur	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-
8	Kabupaten BeraU	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Paser	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Kutai Barat	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
Jumlah		10.752	-	-	2.205	12.931

Kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2023 yaitu:

1. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023, di SMKN Negeri 3 Kota Samarinda.
2. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023, di SMKN Negeri 5 Kota Samarinda.
3. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023, di SMKN Negeri 17 Kota Samarinda.
4. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023, di SMK Pelayaran Kota Samarinda.

5. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023, di SMKN 7 Kota Samarinda.
6. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2023, di SMKN 9 Kota Samarinda.
7. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, di SMAN 10 Kota Samarinda.
8. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, di MAN 2 Kota Samarinda.
9. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, di MA Darul Ikhsan Kota Samarinda.
10. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, di SMA Khatolik Kota Samarinda.
11. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, di MAN 1 Kota Samarinda.
12. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, di SMAN 8 Kota Samarinda.
13. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, di SMAN 16 Kota Samarinda.
14. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, di SMA Sunodia Kota Samarinda.
15. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, di SMA Tunas Kelapa Kota Samarinda.

16. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023, di Pesnatren Nabil Husein Kota Samarinda.
17. Kegiatan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di Hotel Gran Senyur Balikpapan.
18. Kegiatan Pembauran Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA di Kota Samarinda – di Hotel Mercure tanggal 9 Mei 2023. Peserta 170 orang.
19. Kegiatan Silaturahmi Forum-Forum Binaan Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Bumi Senyur Kota Samarinda, 15 Juni 2023. Peserta 120 orang.
20. Kegiatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023, di Halaman Gedung Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
21. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA/SMK tanggal 18 Juli 2023 di Hotel Blue Sky Kota Balikpapan. Peserta 170 orang.
22. Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman (Paket Meeting) - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA/SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara - Hotel Grand Fatma, 25 Juli 2023. Peserta 170 orang.
23. Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA/SMK di Kota Bontang, Tanggal 25 September 2023 - Hotel Equator. Peserta sebanyak 170 Orang.
24. Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober 2023 di Kota Samarinda, Peserta 400 orang.
25. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA/SMK di Kota Samarinda : SMKN 4 SAMARINDA dan SMAN 13 SAMARINDA, tanggal 30 Oktober 2023, peserta 2205 orang.

26. Kegiatan Lemhannas, Tanggal 12 - 19 Nopember 2023 - Kabupaten Penajam Paser Utara.
27. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA/SMK di Kabupaten Kutai Timur, Tanggal 27 Nopember 2023 - Hotel Royal Victoria Sangatta, peserta 170 orang.
28. Kegiatan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur di Balikpapan, Tanggal 6 Desember 2023 - Hotel Swiss Belhotel, peserta 170 orang.
29. Kegiatan Hari Bela Negara Tanggal 19 Desember 2023 di Kota Samarinda, peserta 400 orang.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel 3.16
Realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Penggunaan Hak-hak Politik	Persen	75%	100%	133,33%

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mendukung capaian sasaran, capaian kinerjanya sebesar 133,33%, capaian kinerja dapat dikatagorikan **sangat baik**. Program ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggarannya adalah 100%, 88,89%, dan 98,61%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang menunjang capaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Dialog Bersama Pemuda/Organisasi/Perempuan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, di Cafe Busan Samarinda dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Poldagri Bersama Kab/Kota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, di Hotel Gran Senyur Balikpapan dengan jumlah peserta sebanyak 51 orang.
3. Kegiatan Dialog Interkatif Melalui Media RRI, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, di Studio Si Karut, RRI Samarinda dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
4. Kegiatan Rapat Persiapan Sosialisasi Pendidikan Politik, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, di Kersik Luway Samarinda dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.
5. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, di Hotem Mercure Samarinda dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
6. Kegiatan Tim TP3D di Hotel Mercure Kota Samarinda, tanggal 6 April 2023.

7. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pemilih Menjelang Pemilu di Hotel Horison Kota Balikpapan, tanggal 10 Mei 2023, peserta 120 orang.
8. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Media Publikasi (Bawaslu) Tanggal 16 Juni 2023 dan 17 Juni 2023 di Hotel Mercure Kota Samarinda, peserta 44 orang.
9. Kegiatan Rakor Perkembangan Politik di Daerah Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Hotel Novotel Kota Balikpapan, tanggal 6 Juli 2023, peserta sebanyak 250 orang.
10. Kegiatan Rapat Konsolidasi Demokrasi di Hotel Grand Inna Provinsi Bali, tanggal 13 Juli 2023, peserta sebanyak 100 orang.
11. Kegiatan Focus Grup Discussion (Bawaslu) Tanggal 28 Juli 2023 di Hotel Mercure Kota Samarinda. Peserta sebanyak 42 orang.
12. Kegiatan Rapat Tim Pokja IDI - Hotel Blue Sky Kota Balikpapan, tanggal 8 Agustus 2023, peserta sebanyak 25 orang.
13. Kegiatan Sosialisasi IDI Metode Baru - Hotel Blue Sky Kota Balikpapan, tanggal 9 Agustus 2023, peserta sebanyak 100 orang.
14. Kegiatan Rapat Tim TP3D, Tanggal 20 September 2023 di Hotel Fugo Samarinda, peserta 20 orang.
15. Kegiatan Rapat Tim Pokja IDI, Tanggal 20 September 2023 di Hotel Fugo Samarinda, peserta 25 orang.
16. Kegiatan Dialog Politik Bersama Pemuda/Organisasi/Perempuan, Tanggal 23 September 2023, Tigris Cafe Samarinda, peserta sebanyak 30 orang.
17. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pemilih Menjelang Pemilu di Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 26 September 2023 - Hotel Aqila, peserta 120 orang.
18. Kegiatan Kesbangpol Expo 2023 Milenial Go to Pemilu, Tanggal 17 - 18 Nopember 2023 - Mall Robinson Samarinda.
19. Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dan Non ASN, Tanggal 28 Nopember 2023 - Hotel Platinum Balikpapan. Peserta 175 orang.
20. Kegiatan Rapat Tim Pokja IDI, Tanggal 28 Nopember 2023 - Hotel Platinum Balikpapan, peserta 25 orang.

21. Kegiatan Rapat Teknis Bidang Politik Dalam Negeri, Tanggal 12 Desember 2023 di Hotel Fugo Samarinda, peserta 50 orang.
22. Kegiatan Bimtek Kab/Kota (aplikasi SIPPP DEH), Tanggal 12 Desember 2023 di Hotel Fugo Samarinda, peserta 70 orang.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.17
Realisasi Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	Persen	40,05% (147 ormas)	71,38% (262 ormas)	178,23%

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung capaian sasaran, capaian kinerjanya sebesar 178,23% dapat dikategorikan **sangat baik**. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggarannya 97,53%, 98,28%, dan 99,91%.

Data Pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Data Pembinaan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA ORGANISASI	JENIS ORGANISASI	TANGGAL	KEPERLUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Drs. MARTHEN AR. MANONGGA MH.	L	GRNI	ORMAS	06 January 2023	Pelaporan Organisasi Masyarakat	
2	JUMADI	L	PERIKDA	ORMAS	11 January 2023	Pelaporan Organisasi Masyarakat	
3	DWI ENRO WALUYO	L	FORUM SOLIDARITAS BORNEO	ORMAS	12 January 2023	Pelaporan Perubahan Organisasi Masyarakat	
4	MISPAN	L	BKPAKSI PROV. KALTIM	ORMAS	16 January 2023	Koordinasi	
5	AJI HARIYANI	P	BKW. FORUM KADER BELANEGARA PROV. KALTIM	ORMAS	16 January 2023	Permohonan Skt	
6	HADI WIJAYA	L	PWDOI Kaltim	ORMAS	17 January 2023	Pendaftaran Lembaga Dwdpi	
7	WARDATUSH SHUFIAH	P	LAZ ABADI BERBAGI BERKAH	ORMAS	06 February 2023	Permohonan Skt	
8	HUSNIATI A. N.	p	GREEN FOUNDATION INDONESIA	ORMAS	06 February 2023	Laporan Izin Operasional Kaltim	
9	HJ. NURJANNAH	P	BADAN KOORDINASI MAJELIS TAKLIM MASJID DMI	ORMAS	08 February 2023	Lapor Keberadaan Organisasi	
10	ARESTON DAYANO	L	PERPEDAYAK INDONESIA	ORMAS	14 February 2023	Permohonan Skt	
11	RUBI	P	ORGANISASI SHIDDIQIYAH	ORMAS	14 February 2023	Pendaftaran Skt	
12	JONY SINATRA GINTING	L	HMKI	ORMAS	22 February 2023	Pendaftaran Ormas	
13	ASWIN TAHIR	L	MT AISYAH BSC	ORMAS	23 February 2023	Pendaftaran Ormas	
14	DINA KARTIKA SARI	P	LSM PEJOEANG UMAT	ORMAS	27 February 2023	Pendaftaran Skt	
15	HELMI	L	BHARADIKA	ORMAS	01 MARET 2023	Konsultasi	
16	ANDI SAMUDRA	L	KOMITE SENI BUDAYA NUSANTARA (KSN) DPW. KALTIM	ORMAS	01 MARET 2023	Konsultasi Dan Mengambil Surat tanda Lapor Organisasi	
17	REZA JAKARIA	L	PW MUHAMMADIYAH KALTIM	ORMAS	02 MARET 2023	Pelaporan Organisasi Masyarakat	
18	YONATHAN GHON, SH.	L	DPP. PAGAWAQ ADAT DAYAK NASIONAL (PADAN)	ORMAS	06 MARET 2023	Pendaftaran Organisasi	
19	AKBAR MATARANG	L	KKTJ PIAR KKSS KALTIM	PAGUYUBAN	27 MARET 2023	Pendaftaran Paguyuban	
20	HJ. NUR HIDAYAH S.Ag.	P	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PUAN MAHARANI	YAYASAN	29 MARET 2023	Antar Berkas Organisasi (Daftar)	
21	AHMAD FAUZI	L	DPW AHLULBAIT INDONESIA KALTIM	ORMAS	30 MARET 2023	Penyerahan Laporan Kegiatan Organisasi 2022-2023	
22	AHMAD HIDAYAT	L	IKATAN KELUARGA KANDANGAN	ORMAS	3 April 2023	Pendaftaran Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
23	DARHANI	P	PARADE NUSANTARA KALTIM	ORMAS	3 April 2023	Permohonan Pendaftaran Skt	Pembinaan Secara Langsung
24	WIWIK DWI RETNOWATI	P	LPKR KALTIM	ORMAS	4 April 2023	Permohonan Pendaftaran Skt	Pembinaan Secara Langsung
25	SITI AISYAH	P	DPW FANS OF RHOMA AND SONETA (FORSA) KALTIM	ORMAS	6 April 2023	Melaporkan Keberadaan Organisasi Forsa	Pembinaan Secara Langsung
26	DARHANI	P	PARADE NUSANTARA KALTIM	ORMAS	6 April 2023	Melaporkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

27	NOVIADY DWI NOORCAHYO	L	DPW IKA UII KALTIM	ORMAS	10 April 2023	Mengurus Skt	Pembinaan Secara Langsung
28	EWALDUS BENEDICTUS	L	KAPAKAT ISEN MULANG	ORMAS	11 April 2023	Pengurusan Legalitas Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
29	AHMAD HIDAYAT	L	IKATAN KELUARGA KANDANGAN	ORMAS	26 April 2023	Melengkapi Berkas Persyaratan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
30	UDIN	L	PASUKAN MERAH	ORMAS	3 May 2023	Koordinasi Mengenai Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
31	HJ. ICHA TAHIR	P	MT. AISYAH SEMPAJA BSC	ORMAS	11 May 2023	Mendaftarkan Majelis (Perkumpulan)	Pembinaan Secara Langsung
32	ALI MUSTAFA	L	FKDM KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
33	GUNAWAN P.	L	NU KUTIM	KEAGAMAAN	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
34	MUKHTAR	L	NU KUTIM	KEAGAMAAN	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
35	SUYUTI	L	PD MUHAMMADIYAH KUTIM	KEAGAMAAN	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
36	H. YUSUF	L	FKUB KUTIM	KEAGAMAAN	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
37	PAUL KORWA	L	FKUB KUTIM	KEAGAMAAN	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
38	KHOIRUL ARIFIN	L	FKDM KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
39	DIRMAN	L	BALADIKA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
40	ANANG A.	L	BALADIKA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
41	M. SADAT	L	LKPAK KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
42	SJAIM	L	IKA PAKARTI KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
43	DEMI	L	LKPAK KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
44	FRANKY	L	GPPK KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
45	USMAN NATSIR	L	GPPK KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
46	CRESTIANUS K.	L	FKPPM KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
47	JOYCE SOFIE SINGAL	P	FKPPM KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
48	NAJAMUDDIN	L	KKB-BIMA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
49	TAHMIL TUBAN SABU	L	IKBST KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
50	SITI SAIJAN	P	PMII KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
51	ARDIANSYAH	L	PMII KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
52	HJ. MISNA	P	GARDA PEMUDA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
53	HERWANSYAH MASDAR	L	GARDA PEMUDA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
54	MOH. ALI B. MUSA	L	HMI KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
55	SAIDIN	L	LKT-PA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
56	BURHANUDDIN	L	LKT-PA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

57	MAHRUS	L	IKA PAKARTI KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
58	AGUS KURNIADY	L	HMI KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
59	MUHAMMAD A.	L	KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
60	M. RIZKI FAHERA GANI	L	KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
61	RISMAN	L	KKSS KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
62	ILHAM	L	IKBST KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
63	MARJAN	L	IKBST KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
64	NUSKIN	L	KERUKUNAN KELUARGA BIMA KUTIM	ORMAS	16 May 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
65	WIDYASARI SEPTI CAHYANI	P	YAYASAN DANA KEMANUSIAAN INDONESIA KUTIM	YAYASAN	19 May 2023	Permohonan Pendaftaran Skt	Pembinaan Secara Langsung
66	DRS. ASDEDI	L	SEMPEKAT TONYOOI BENUAQ KALTIM KUTIM	PERKUMPULAN	20 May 2023	Penyampaian Laporan Mubes Vi	Pembinaan Secara Langsung
67	HAMRANI ABDI	L	MPUB KALTIMTARA KUTIM	ORMAS	25 May 2023	Koordinasi Pendaftaran Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
68	ABIES D KAMBEY	L	KKK KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
69	ALBINUS ALI	L	LAD KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
70	BENEDIKTUS SENI	L	IKENTIM KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
71	TM KAODI	L	IKENTIM KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
72	I. SYULENY	L	AMAN KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
73	STEPANUS LEJIU	L	AMAN KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
74	ROSMADI	L	SRA KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
75	SENIUS	L	SRA KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
76	A. TRI BAGUS SAPUTRA	L	LPADKT KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
77	JASMAN	L	MACAN BORNEO KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
78	ESTER	P	MACAN BORNEO KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
79	HERMONIUS	L	HABAMA KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
80	YAMIN JANDO	L	WUA MESU KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
81	MARTINA	P	STB KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
82	H. ARDY S.	L	LKK KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
83	ASRO	L	LKK KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
84	RUSDA	L	LASKAR GEPAK KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
85	ALBET ML	L	LASKAR GEPAK KUBAR	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

86	UJANG	L	PERPEDAYAK	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
87	YAPILAMIN	L	PERPEDAYAK	ORMAS	14 June 2023	Acara Coffee Morning	Pembinaan Secara Sosialisasi
88	DODY PRABOWO	L	DPD PA GMNI KALTIM	ORMAS	03 July 2023	Mengurus SKT	Pembinaan Secara Langsung
89	MUHAMMAD IBNU FAUZAN RAMADHAN	L	IMORI KALTIM	ORMAS	03 July 2023	Pembuatan Legalitas Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
90	SYARIDAYANTI	P	PONDOK BUJAK ETAM BENUA	ORMAS	31 July 2023	Mendaftar SKT	Pembinaan Secara Langsung
91	AHMAD FACHRUDDIN	L	PIMPINAN WILAYAH PERSATUAN ISLAM	ORMAS	11 Agustus 2023	Mengurus SKT	Pembinaan Secara Langsung
92	DODIT KUSNIANTO	L	SENKOM	ORMAS	24 Agustus 2023	Melapor Kegiatan Dan Legalitas Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
93	DODIT KUSNIANTO	L	SENKOM PASER	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
94	ABD. SAMI	L	PSHT PASER	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
95	M. JAMAURI	L	KBBKT PASER	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
96	RUDIANSYAH	L	PASAK BAKUDAPATI PASER	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
97	M. JUNAIDI	L	KBBKI PASER	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
98	RIZHAN	L	PASAK BAKUDAPATI PASER	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
99	DUENA BINTANG F.	L	PAKARTI MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
100	MICAEL HIBO	L	PERPEDAYAK PLB MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
101	ANDREAS IRVAN	L	LPDKT MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
102	MUHAMMAD RIFKY	L	MUI MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
103	FIDEUS MILANG	L	HENGKUNG KALUNG	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
104	ANSELMUS B.	L	SONUS GRATIA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
105	YULI NUGROHO	L	HIDAYATULLAH MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
106	LAURENSIUS DING LIE	L	HINANBASMU MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
107	AGUSTINUS M.	L	PERHIMPUNAN PULMA KAYAN MAHULU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
108	PRISKA	L	AMAN KUBAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
109	HERMONIUS	L	HABAMA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
110	STEFANUS LEJIU	L	AMAN KUBAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
111	MATHIUS MENTIK	L	LAD-KB KUBAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
112	AMONTIUS	L	PM TBBR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
113	ALBINUS ALI	L	LAD-KB KUBAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
114	SOROY	L	GEPAK KUBAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
115	SETIYABUDI	L	IKSPI KERA SAKTI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

116	HJ. MUNAWAR SB	P	PWL KAYA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
117	JUNAIDAH	P	MUSHIDA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
118	HETI	P	SEMPEKAT KERON KUTAI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
119	TEGUH ADNI PUTRA	L	GEPAK BONTANG	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
120	ENDANG SURYANINGSIH	P	BBB BERAU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
121	SALMIA	P	YAYASAN BERAU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
122	IDA ERLIANA	P	BBJ BERAU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
123	JERRY	L	YAYASAN BERAU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
124	GERRY ARTOBELLY SH.	L	LPAD KUTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
125	AGUS KURNIADY	L	HMI KUTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
126	SITI SAIJAH GHANI	P	PMII KUTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
127	DR. H. ERNATA	L	IKAWANGI KUTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
128	RIKA R.	P	DPC LKB SAMARINDA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
129	HAMSYI D.	L	FKPMKT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
130	RAHMAD LUBIS	L	IMAM (MANDAILING) BALIKPAPAN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
131	DEDE S.	L	SENKOM BALIKPAPAN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
132	YULI SHINTA	P	IWAPI BALIKPAPAN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
133	SUHARTINI HASENG	P	IWAPI BALIKPAPAN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
134	M. SARWANI ABDAN	L	LSM KAMI SAHABAT PEDULI LINGKUNGAN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
135	ABDUL SAMAD	L	LAUNG KUNING BANJAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
136	ELDIANSYAH	L	BALADIKA PPU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
137	MUHAMMAD SALEH	L	PKBSK PPU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
138	LELAINIYATI M. L.	L	KOPPAD DISTRIK PPU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
139	DARTI	P	DAD PPU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
140	FAHRURRAZI	L	KBB PPU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
141	H. HARDIANSYAH	L	FKBBKB KUKAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
142	DIWANSYAH	L	SDA KUKAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
143	RUDY HARTONO	L	SPI KUKAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
144	ROBIANSYAH	L	BALAKAR SANGAJI KUKAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
145	ZAINUDDIN	L	WAHDAH ISLAMIYA KUKAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

146	HARIS	L	KAYUH BAIMBAY KUKAR	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
147	DR YAHYA MH	L	PDADKB KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
148	ERNI KARTIKA	P	MUSLIMAT HIDAYATULLAH KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
149	SRI YONO	P	DPD SIJAKA SAMARINDA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
150	SETYO PS	L	FKPT KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
151	HJ. AJIRATNA DEWI	P	DPP SIJAKA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
152	MAISYARAH	P	GRANAT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
153	ANDY S.	L	LASKAR MANDAU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
154	ODIE ANTHONY	L	YAYASAN BP	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
155	DR HJ UNBAYUH	P	LBAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
156	SUHARYANI	P	DPP IARMI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
157	M. JAFAR H.	L	FKPMKT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
158	FIFIN ALFIANNUR	P	DPW LASKAR GEPAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
159	FITRIANI	P	LBBKT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
160	RIKA R.	P	DPC LKB SAMARINDA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
161	SYAHARIE J.	L	KMI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
162	YAHYA UBAY	L	KDKLT-KT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
163	RINI ARI DEWI	P	SRIKANDI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
164	AAN ANSHORI	L	ICMI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
165	HJ. MARYAM A	P	OPPS	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
166	SUMATI	P	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
167	GUSTI ADDY R	L	PUSARA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
168	HJ. MAHDALENA	P	KSS	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
169	NUH LENJAN	L	LADK KT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
170	AGUS RIFANY	L	IKA UII KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
171	HJ MARTY	P	IBDD KT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
172	NURSIHAH	P	MPUB	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
173	ADOLFUS S. E.	L	PPK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
174	SUDIRMAN	L	FKPD	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
175	YULIAWAN A	L	FKPT KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

176	MARIDI PRATAMA	L	FSB	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
177	SYARIDAYANTI	P	KAWAN GEPAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
178	HM. AINUL ROFIK	L	FKDM KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
179	H.M. NASIR	L	KJS	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
180	STANLY M.	L	DPW K3 KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
181	SAMA'IAH	P	DPW SRIKANDI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
182	RUSDIANA	P	LMAKB	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
183	WS. HASUNGA	L	DPADKB	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
184	RATNASARI TRI F	P	TRC PPA KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
185	H. SULANTO	L	KIP KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
186	HJ. MARTY	L	IBBB KT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
187	DESSY NURSANTI	P	KIP KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
188	IRWANSYAH	L	BELA NEGARA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
189	HELMI	L	BALADIKA KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
190	BATUBARA	L	SKOMENWA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
191	BAQA H SITOMPUL	L	KASMENWA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
192	BAHOI	L	BAHOI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
193	M. INDRA	L	DPW GEPAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
194	DITA DWI M. P.	P	LPMK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
195	ISMA HARIYANTO	L	KJP	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
196	DESAK K P	P	FPK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
197	AGUS MUSTAPA	L	KJP	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
198	TOHA HABSIEH	L	DOO PERTI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
199	THERESIA	P	ICDN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
200	HJ ENCIK WIDTANI	P	LBAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
201	RITO RIKO	L	AWPI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
202	YUDHA	L	MADA KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
203	M. ZEAN	L	I CARE	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
204	AJANG KEBUNG	L	LADK KT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
205	DURI	L	WPP KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

206	AHMAD FADLI	L	DPW PARADE	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
207	ENI IRAWATI	P	KAWAN GEPAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
208	DIDIK SETYAWAN	L	IKAPAKARTI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
209	AGUSTINO F.	L	FKPTT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
210	DARUSH PUSPA SARY	P	GRANAT SMD	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
211	YULI	P	FBK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
212	LAMHOT	L	LPADKT KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
213	LA SINIEN	L	SINAR KALIBUNDA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
214	ABDUL HADI	L	FKUB KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
215	DEDY H	L	RKB	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
216	H EKO BUDIONO	L	LDII PROV	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
217	IKHWAUL MUSLIM	L	PWPM KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
218	ARIF W	L	DPW GEPAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
219	KO NUR HIDAYAH	L	MAHA MUDA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
220	HOERIS	L	INDO MUSLIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
221	JAMALUDIN	L	BUDAYA	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
222	YUSRI	L	YUSRI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
223	KRISHAN P CANDRA	L	LDII PROV	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
224	MUHAMMAD IRWAN	L	DPP LBN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
225	HJ SITI AISYAH TAHIR	L	MT AISYAH SEMPAGA SMD	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
226	MARTINUS USAT	L	DEWAN ADAT DAYAK KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
227	M SYAHADA	L	SENKOM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
228	ARIF FAHRIZAL	L	DPP LBN	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
229	AJI HABIBULLAH	L	DPP LPAP	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
230	IMAM MAHRIJI	L	MADA LMP KALTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
231	FARIDAH	P	MPUB	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
232	WESLEY L H	L	FPK KUTIM	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
233	HJ ISLAMIDATI	P	GRANAT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
234	ANAY SELASIAN SE	P	LASKAR MANDAU	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
235	HJ DR SUBAYIH	P	LBAK	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

236	SUHARYADI	L	DPP IARMI	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
237	PROF DR M JAFAR HARUNA	L	FKPMKT	ORMAS	30 Agustus 2023	Acara Rakor Forkopimda	Pembinaan Secara Sosialisasi
238	RUDY	L	DPW FORUM KOMUNIKASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA NUSANTARA	ORMAS	31 Agustus 2023	Mendaftar Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
239	NUH LENJAU	L	LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH	ORMAS	20 October 2023	Melaporkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
240	THAMRIN	L	Forum komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Provinsi Kalimantan Timur	ORMAS	13 November 2023	Mendaftarkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
241	ABDUL GANI	L	PEGIAT ANTI NARKOBA INDONESIA	ORMAS	13 November 2023	Melaporkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
242	SEHADI IRAWAN	L	ALIANSI SASAK LOMBOK INDONESIA (ASLI)	ORMAS	15 November 2023	Melaporkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
243	SUWANTO	L	TDO	ORMAS	15 November 2023	Melaporkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung
244	ADI	L	PERTAPA	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
245	AGUS	L	KOMDASLIBER	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
246	SARI	L	IWAPI	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
247	VARA	L	KIP	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
248	AJI	P	I CARE	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
249	HADI	L	GEPAK	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
250	M. YASIN	P	FKPTT	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
251	DINA KARTIKA SARI	p	PEJOEANG UMAT	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
252	SUYANTO	P	WAROG PONOROGO	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
253	FANDI	L	PASAK BAKUDAPATI	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
254	DADANG	P	PBEB	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
255	RANDY	L	DPADKB	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
256	THALIB	L	FKMS	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
257	ARYA	P	MUHAMMADIYAH	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
258	DONI	L	IMASKAB	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
259	ANDI	L	GAMKI	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
260	SINTYA	L	WANITA KATOLIK RI	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
261	DODI	L	DAD	ORMAS	10 December 2023	Acara Kesbangpol Festival Ormas Expo	Pembinaan Secara Sosialisasi
262	HJ. SITI MARIAM	P	KATALIA	ORMAS	18 November 2023	Melaporkan Organisasi	Pembinaan Secara Langsung

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang menunjang capaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Kegiatan Coffee Morning/Silaturahmi dengan Ormas dan Badan/Lembaga di Kabupaten Kutai Timur - Hotel Royal Victoria, 16 Mei 2023. Peserta 65 orang
 2. Kegiatan Kegiatan Coffee Morning/Silaturahmi dengan Ormas dan Badan/Lembaga di Kabupaten Kutai Barat - Hotel Sidodadi, tanggal 16 Juni 2023, peserta 65 orang.
 3. Kegiatan Pembinaan terhadap ormas sebanyak 66 ormas.
 4. Kegiatan Verifikasi Data Ormas se Kaltim Tanggal 11 Juli 2023 - Hotel Bumi Senyur Kota Samarinda, peserta sebanyak 40 orang.
 5. Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Semester I Tahun 2023, Tanggal 10 Agustus 2023 - Hotel Bumi Senyur Samarinda, peserta sebanyak 25 orang.
 6. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas Dalam Mensukseskan Pemilu 2024, Tanggal 29 s.d 30 Agustus 2023 - Hotel Ibis Samarinda, peserta sebanyak 90 orang.
 7. Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Hibah dan Bansos Triwulan II Tahun 2023, Tanggal 09 Nopember 2023 - Hotel Bumi Senyur Samarinda, peserta 20 orang.
 8. Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Hibah dan Bansos Triwulan III dan IV Tahun 2023, Tanggal 09 Nopember 2023 dan tanggal 10 Nopember 2023 - Hotel Bumi Senyur Samarinda, peserta 50 orang.
 9. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Semester II Tahun 2023, tanggal 22 November 2023 - Hotel Midtown Samarinda, peserta 25 orang.
 10. Kegiatan Expo Ormas Tanggal 10 Desember 2023 di Gor Kadrie Oening Sempaja Samarinda.
- 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Tabel 3.19

**Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2023**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persen	100% (4 Rekomendasi)	100% (4 Rekomendasi)	100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam mendukung capaian kinerja, realisasi capaian kinerjanya sebesar 100% dapat dikategorikan sangat baik. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu Kegiatan (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 65,93%, 99,88% dan 99,98%.

Data daftar Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dikeluarkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Daftar Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tanggal	Nomor	Ket
1	2	3		4
1	1. Memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga. 2. Memastikan kecukupan	3 April 2023	500/516/III-BKP/IV/2023	

	pasokan maupun harga kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur yang stabil. 3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Mendorong pemakaian produk dalam negeri dan peningkatan sector pariwisata			
2	1. Perlunya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika dan Psikotropika secara menyeluruh di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Perlu dilakukan penegakan hukum, terhadap tindakan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Timur.	20 Juni 2023	500/866/VI/KESBANGPOL.III	
3	1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mencermati perkembangan pembangunan secara nasional dan global yang akan bersifat dinamis dana jangka pendek dan menengah. Penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta antar daerah di Kalimantan Timur menjadi kunci awal kesuksesan perencanaan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. 2. Perencanaan Kalimantan Timur ke depan perlu didorong dengan merubah pendekatan pembangunan yang resource based menjadi knowledge based. Sementara itu, upaya transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong percepatan hilirisasi industri. Proses transformasi ekonomi perlu dilakukan secara cermat, terutama berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. 3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan menjadi momentum bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan standar pelayanan publik, memacu kegiatan produksi dan pengolahan, mengembangkan infrastruktur yang maju dan	26 September 2023	200.1.6/1567.1/Kesbangpol.III	

	modern, mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kerjasama investasi, serta memperluas dan kemitraan perdagangan antar daerah.			
4	1. Memperkuat fungsi pengawasan informasi dan komunikasi untuk mencegah ujaran kebencian dan hoax di Provinsi Kalimantan Timur. 2. Memperkuat koordinasi dengan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024. 3. Memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga. 4. Memastikan kecukupan pasokan maupun harga kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur yang stabil.	18 Desember 2023	200.1.4/2371/Kesbangpol.III	

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama Se-Kaltim, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di Hotel Bumi Senyur Samarinda.
2. Kegiatan Medical Chek Up Napza kepada seluruh ASN dan Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kegiatan Rapat Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama se Kab/Kota se Kaltim Tanggal 11 Juli 2023 - Hotel Bumi Senyur Kota Samarinda, peserta sebanyak 50 orang.
4. Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk Menumbuhkan Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Prov Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara - Hotel Grand Fatma, tanggal 26 Juli, peserta sebanyak 65 orang.

5. Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Hibah dan Bansos, Tanggal 8 Agustus 2023 - Hotel Midtown Samarinda, peserta sebanyak 20 orang.
6. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Semester I Tahun 2023, Tanggal 14 Agustus 2023 - Hotel Bumi Senyur Samarinda, peserta 50 orang.
7. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) di Kab/Kota Prov Kaltim di Kabupaten Penajam Paser Utara - Hotel Aqila, tanggal 22 Agustus 2023, peserta sebanyak 65 orang.
8. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di Daerah Semester I Tahun 2023, Tanggal 29 Agustus 2023 - Hotel Bumi Senyur Samarinda, peserta sebanyak 25 orang.
9. Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kab/Kota di Kaltim, Tanggal 21 September 2023 - Hotel Grand Senyur Balikpapan, peserta sebanyak 65 orang.
10. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di Daerah di Kota Samarinda, tanggal 15 Nopember 2023 - Hotel Aston Samarinda, peserta sebanyak 25 orang.
11. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Samarinda, tanggal 21 Nopember 2023 - Hotel Aston Samarinda, peserta sebanyak 50 orang.
12. Kegiatan Expo UMKM Tanggal 10 Desember 2023 di Gor Kadrie Oening Sempaja Samarinda.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tabel 3.21

Realisasi Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Persen	33% (100)	41,25% (125)	125%

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial juga mendukung capaian kinerja, realisasi capaian kinerjanya sebesar 125% dapat dikategorikan **sangat baik**, penanganan konflik sejumlah 17 yang tertangani, unjuk rasa sebesar 60, dan penyelesaian masalah sebanyak 48, total keseluruhan sebanyak 125. Program ini terdiri dari empat sub kegiatan yaitu Kegiatan (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 93.65%, 99.69%, 98.76% dan 99.86%.

Daftar Data Konflik, Unjuk Rasa dan Penyelesaian Masalah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Daftar Data Konflik, Unjuk Rasa dan Penyelesaian Masalah
Tahun 2023

No	Data	Tahun 2023	Keterangan
1	2	3	4
1	Konflik	17	-
2	Penyelesaian Masasalah	48	-
3	Unjuk Rasa	60	-
Jumlah		125	

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi dengan tema "Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikal dan Terorisme Menjelang Pemilu 2024 serta Menyukkseskan Perpindahan Ibu Kota Negara" dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 di Hotel Elty Kutai Kartanegara.
2. Kegiatan Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur - Triwulan I di Kota Samarinda, Hotel Bumi Senyur, tanggal 12 April 2023, peserta 20 orang.
3. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Hotel Bumi Senyur, tanggal 24 Mei 2023. Peserta 20 orang.
4. Kegiatan Rapat Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Hotel Bumi Senyur tanggal 17 Mei 2023. Peserta 20 orang.
5. Kegiatan Rapat Tim Kewaspadaan Dini Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Hotel Bumi Senyur), tanggal 23 Mei 2023. Peserta 20 orang.
6. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024 di Kota Balikpapan (Hotel Novotel), tanggal 8 Juni 2023, peserta 100 orang.
7. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen tanggal 25 sd 27 Juli 2023 di Hotel Fugo Samarinda, peserta 180 orang.

8. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2023 di Hotel Harris Samarinda, peserta 20 orang.
9. Kegiatan Sosialisasi Perpres No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 tanggal 23 Agustus 2023 di Hotel Novotel Kota Balikpapan, peserta 100 orang.
10. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Nasional, tanggal 24 Agustus 2023 di Hotel Novotel Kota Balikpapan, peserta 66 orang.
11. Kegiatan Rapat Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi - Hotel Mercure Samarinda, tanggal 30 Agustus 2023, peserta 200 orang.
12. Kegiatan Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 19 September 2023 - Hotel Midtown Samarinda, peserta 132 orang.
13. Kegiatan Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Nopember 2023 di Hotel Aston Kota Samarinda, peserta 20 orang.
14. Kegiatan Rapat Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Nopember 2023 di Hotel Aston Kota, peserta 20 orang.
15. Kegiatan Rapat Tim Indeks Kewaspadaan Nasional, tanggal 23 Nopember 2023 di Hotel Aston Kota Samarinda, peserta 20 orang.
16. Kegiatan Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Nopember 2023 di Hotel Aston Kota Samarinda, peserta 20 orang.
17. Kegiatan Forum Koordinasi Penguatan Pemantauan Orang Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 30 Nopember 2023 - Hotel Mercure Samarinda, peserta 85 orang.
18. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 5 Desember 2023 di Hotel Midtown Kota Samarinda, peserta 20 orang.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai satu Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan. antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Demokrasi Indonesia	82,05	83,58	101,86%	Rp.290.304.868.457,-	Rp.288.660.776.812,-	99,43%
Jumlah					Rp.290.304.868.457,-	Rp.288.660.776.812,-	99,43%
Total Belanja Modal					Rp.3.040.762.151,-	Rp.2.980.064.684,-	98%

2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,420,332,615.00	20,063,562,595.00	98.25%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,324,000.00	956,750,872.00	95.64%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	690,559,000.00	663,221,312.00	96.04%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309,765,000.00	293,529,560.00	94.76%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,842,059,189.00	8,707,156,349.00	98.47%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,327,841,689.00	8,196,552,169.00	98.42%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	388,440,000.00	388,440,000.00	100.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	125,777,500.00	122,164,180.00	97.13%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,090,000.00	29,826,400	82.64%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36,090,000.00	29,826,400	82.64%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44,440,000.00	39,600,000.00	89.11%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	44,440,000.00	39,600,000.00	89.11%	

	Kelengkapannya				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,694,479,851.00	3,561,790,547.00	96.41%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,468,816,351.00	1,386,550,252.00	94.40%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,640,000.00	50,404,650.00	84.51%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,989,103,500.00	1,952,607,645.00	98.17%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	176,920,000.00	172,228,000.00	97.35%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,716,944,000.00	4,704,477,484.00	99.74%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,716,944,000.00	4,704,477,484.00	99.74%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,916,968,575.00	1,911,689,755.00	99.72%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	213,607,000.00	209,002,860.00	97.84%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,703,361,575.00	1,702,686,895.00	99.96%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,027,000.00	152,271,188.00	90.09%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	151,947,000.00	135,346,188.00	89.07%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,080,000.00	16,925,000.00	99.09%	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3,872,446,000.00	3,498,581,200.00	90.35%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,872,446,000.00	3,498,581,200.00	90.35%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3,339,646,000.00	2,971,577,478.00	88.98%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	243,000,000.00	239,189,110.00	98.43%	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	289,800,000.00	287,814,700.00	99.31%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	187,101,422,142.00	186,442,904,604.00	99.65%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	187,101,422,142.00	186,442,904,604.00	99.65%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	186,212,222,142.00	185,624,857,227.00	99.68%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	423,000,000.00	409,574,342.00	96.83%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	466,200,000.00	408,473,035.00	87.62%	

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	73,657,644,200.00	73,538,076,779.00	99.84%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	73,657,644,200.00	73,538,076,779.00	99.84%	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	73,142,844,200.00	73,023,678,900.00	99.84%	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	241,800,000.00	241,784,724.00	99.99%	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	273,000,000.00	272,613,155.00	99.86%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1,255,375,000.00	1,202,155,263.00	95.76%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,255,375,000.00	1,202,155,263.00	95.76%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	778,375,000.00	725,735,363.00	93.24%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	258,600,000.00	258,113,775.00	99.81%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	218,400,000.00	218,306,125.00	99.96%	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3,997,648,500.00	3,915,496,283.00	97.94%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3,997,648,500.00	3,915,496,283.00	97.94%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,162,538,500.00	1,088,662,979.00	93.65%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	288,000,000.00	287,104,949.00	99.69%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	340,200,000.00	335,972,355.00	98.76%	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2,206,910,000.00	2,203,756,000.00	99.86%	
	Total Belanja Daerah	290,304,868,457.00	288,660,776,724.00	99.43%	

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi per program kegiatan diatas 99,43% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran melalui DPA Murni dan Perubahan sebesar Rp.290.304.868.457,- yang terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp287.264.106.306,- yang diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Proses penggunaan anggaran Belanja Operasi pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang direncanakan, hal ini terlihat dari realisasi penggunaan dana tidak mendapat kendala, realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp285.680.712.128,- atau 99,45%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp3.040.762.151,- dimana sampai dengan 31 Desember 2023 semua program kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%. Dan realisasi keuangan sebesar Rp2.980.064.684,- atau 98%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah atas petunjuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan kategori **Sangat Baik**, hasil laporan akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 101,87%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan hasil yang optimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang antara lain yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
5. Memperkuat komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun-tahun mendatang.

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Sufian Agus M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196602041988031016